

BAB 4

IDENTIFIKASI KRITERIA KAWASAN PERI-URBAN JABODETABEKJUR SERTA KARAKTERISTIKNYA DI DALAM LINGKUP METROPOLITAN

Bab ini berisi tentang identifikasi kriteria spasial dan non-spasial (ekonomi dan demografi) kawasan peri-urban yang khas untuk kasus Jabodetabekjur. Kriteria ini kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prosedur berbasis statistik untuk mengidentifikasi dan mendelineasi kawasan peri-urban Jabodetabekjur. Sub bab selanjutnya akan memberikan ulasan tentang hasil penentuan batas-batas kawasan peri-urban metropolitan Jabodetabekjur yang diturunkan dari analisis pengelompokan. Sub bab terakhir akan menjelaskan tentang karakteristik kawasan peri-urban Jabodetabekjur dibandingkan dengan kelompok lainnya.

4.1 Identifikasi Faktor Spasial dan Non-Spasial Kawasan Peri-Urban Jabodetabekjur sebagai Rujukan bagi Prosedur Penentuan Delineasi Kawasan Peri-Urban

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu hipotesis utama mengenai keberadaan suatu area transisi yang dihasilkan oleh adanya interaksi antara kota dan desa di Kawasan metropolitan Jabodetabekjur. Area ini menjadi sebuah pusat aktivitas baru di luar area pusat utama DKI Jakarta yang memiliki kombinasi antara karakteristik perkotaan dan karakteristik perdesaan, yang dikenal dengan sebutan *peri-urban*.

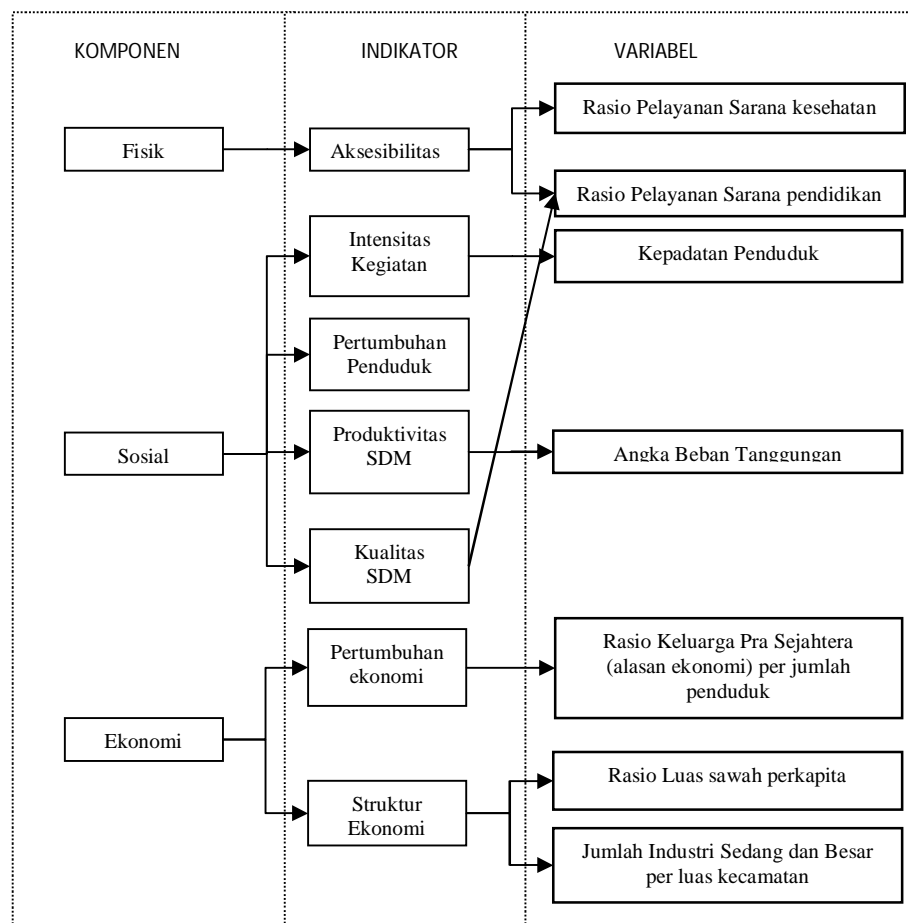
Dalam penyusunan prosedur identifikasi batas-batas kawasan pinggiran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel-variabel khusus yang dapat menunjukkan keunikan kombinasi antara karakteristik perkotaan dan perdesaan yang dimiliki oleh area peri-urban. Variabel tersebut diturunkan dari indikator yang didapatkan melalui studi literatur dan penelitian-penelitian terdahulu kemudian dibenturkan dengan ketersediaan data di lapangan.

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terdapat banyak indikator yang dapat menunjukkan karakteristik peri-urban. Penelitian tentang peri-urbanisasi menghadapi pada kebutuhan untuk menganalisis variabel dalam jumlah besar dan melebihi kemampuan penulis. Oleh sebab itu, variabel-variabel yang diturunkan dari indikator sebaiknya direduksi untuk menghasilkan variabel-variabel utama yang paling bisa merepresentasikan karakteristik peri-urban. Berdasarkan penerapan prosedur serupa oleh Lin (2001), pemilihan variabel ini harus didasarkan oleh pertimbangan yang matang dan dilandasi oleh beberapa syarat. Syarat pertama adalah variabel-variabel tersebut harus bisa mewakili karakteristik ekonomi, demografis maupun fisik dari setiap kelompok kecamatan di Jabodetabekjur. Hal ini disebabkan karena peri-urbanisasi adalah proses dinamis yang terjadi ketika kawasan desa yang berada di sekitar kawasan perkotaan mengalami perubahan karakteristik menjadi lebih bersifat perkotaan, baik dari segi fisik, ekonomi maupun sosial. Kemudian, jumlah variabel yang dipilih tidak boleh lebih dari jumlah objek kecamatan sehingga dapat dihasilkan pengelompokan variabel (faktor) yang memiliki jumlah variabel yang paling sedikit dengan tingkat representasi yang tinggi. Jumlah objek (kecamatan) yang ada dalam penelitian ini adalah 140 objek kecamatan, dan satu area DKI Jakarta yang dipandang sebagai kesatuan perkotaan inti di Jabodetabekjur yang terintegrasi. Oleh sebab itu, jumlah variabel yang dipilih harus memiliki selisih yang jauh dari jumlah objek kecamatan yang berjumlah 141 objek. Syarat terakhir adalah variabel yang dicari harus tersedia di lembaga/instansi terkait serta harus mencakup seluruh objek kecamatan yang akan diteliti. Syarat ini menjadi sangat penting mengingat sebagian besar studi-studi peri-urbanisasi yang diadaptasi berasal dari negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan variabel data yang dicari belum tentu sesuai dengan jenis data di Indonesia.

Kawasan metropolitan Jabodetabekjur merupakan kawasan yang dinamis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi terkini dari kawasan peri-urban di metropolitan Jabodetabekjur. Oleh sebab itu, periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun terbaru yaitu tahun 2008. Unit analisis yang digunakan merupakan unit analisis yang mengacu pada batasan

administratif terkecil yang paling memungkinkan menunjukkan karakteristik fungsional peri-urban, yaitu kecamatan. Unit analisis ini dipilih dengan pertimbangan ingin melihat sejauh mana peri-urbanisasi telah berkembang sebagai bentuk perluasan fungsi perkotaan yang terus melebar hingga melewati batas-batas administrasi - kota tersebut.

GAMBAR 4.1
KOMPONEN, INDIKATOR DAN VARIABEL PENENTU



Sumber: BAB 2

Variabel yang akan digunakan sebagai penentu hierarki kawasan metropolitan diturunkan dari indikator-indikator yang mengacu pada studi-studi terdahulu dan mewakili seluruh komponen sosial ekonomi dan fisik. Variabel diturunkan dari indikator yang kemudian dibenturkan dengan ketersediaan data di lapangan.

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.1, penelitian ini menggunakan tujuh variabel yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan literatur dan ketersediaan data di lapangan. Ketujuh variabel ini kemudian akan dikelompokkan dengan analisis faktor. Untuk itu, dibutuhkan standarisasi baku untuk menyamakan satuan pada tiap variabel. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kesalahan analisis akibat perbedaan kondisi geografis antar kecamatan terutama dilihat dari segi luas kecamatan yang bervariasi. Berdasarkan pertimbangan logis melalui kajian literatur dan ketersediaan data di lapangan, Berikut adalah variabel-variabel yang dipilih beserta satuan (standar bakunya):

1. Kepadatan penduduk

Beragamnya kegiatan perekonomian di kawasan metropolitan mengakibatkan keragaman kepadatan penduduk di kawasan Jabodetabekjur. Menurut Hugo (1987), umumnya jumlah penduduk di kawasan yang bersifat kota terus meningkat. Penyebabnya adalah tingkat migrasi masuk ke kota yang tinggi. Hal ini mengakibatkan kepadatan penduduk kota menjadi tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi di kawasan yang bersifat perdesaan. Tingginya migrasi keluar mengakibatkan kepadatan penduduk di desa menjadi rendah. Kawasan pinggiran memiliki tingkat migrasi masuk yang tinggi (Hugo, 1987) dan tingkat pertumbuhan yang pesat (Garreau, 1988). BPS pun menggunakan variabel ini sebagai pertimbangan utama dalam melakukan klasifikasi desa dan kota. Dengan adanya perbedaan karakteristik kepadatan penduduk yang mencolok, maka data ini dapat menjadi variabel yang kuat dalam menentukan pengelompokan kota, desa, dan peri-urban di kawasan metropolitan Jabodetabekjur. Satuan yang digunakan sebagai pembakuan nilai adalah jiwa/hektar.

2. Angka Beban Tanggungan

Angka beban tanggungan menunjukkan perbandingan antara orang yang tidak produktif kepada orang produktif. Menurut Harto Nurdin (Lembaga Demografi FEIU), secara kasar angka beban tanggungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara apakah tergolong maju atau bukan. Dengan beragamnya lapangan pekerjaan dan corak

kegiatan ekonomi di metropolitan Jabodetabekjur, produktivitas masyarakat pun semakin tinggi. Semakin jauh dari inti perkotaan, lapangan pekerjaan menjadi semakin homogen serta semakin bersifat agrikultur dan industri primer (Hugo,1987). Oleh sebab itu, indikator ini pun diadaptasi sebagai variabel penentu kawasan peri-urban Jabodetabekjur.

3. Kesejahteraan Penduduk

Menurut Evers dan Korff (2002), pola migrasi masyarakat desa, terutama yang ada di asia tenggara masih dilatabelakangi oleh alasan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka. Konsep keluarga sejahtera ditetapkan melalui UU No.10 Tahun 1992. Dalam penelitian ini, variabel kesejahteraan akan diwakilkan oleh data keluarga pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Variabel ini merupakan pengganti dari variabel pendapatan per kapita. Asumsinya, masyarakat yang termasuk keluarga pra sejahtera memiliki pendapatan per kapita yang kecil sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Satuan yang digunakan adalah rasio perbandingan antara jumlah keluarga pra sejahtera di suatu kecamatan per total jumlah keluarga di kecamatan tersebut.

4. Intensitas Kegiatan Industri

Kawasan kota memiliki karakteristik kegiatan ekonomi yang didominasi oleh kegiatan sekunder dan tersier sedangkan kawasan perdesaan didominasi oleh kegiatan agrikultur dan industri primer (Hugo, 1987). Kawasan pinggiran memiliki perpaduan antara kedua karakteristik tersebut. Webster (2002) menyatakan bahwa di dalam kawasan piggiran terjadi perubahan struktur ekonomi, dari yang berbasis agrikultur menjadi dominasi manufaktur. Hal ini mengakibatkan kawasan piggiran memiliki kombinasi antara kegiatan industri dan pertanian. Dengan adanya perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi yang mencolok, data intensitas kegiatan industri dapat dijadikan sebagai variabel kuat dalam menentukan batasan

kawasan pinggiran Jabodetabekjur. Data yang digunakan adalah jumlah industri sedang dan besar di tiap kecamatan. Klasifikasi ini dipilih karena industri ini memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dibandingkan industri kecil yang cenderung mudah *collapse*. Satuan yang digunakan untuk menstandarkan variabel terhadap seluruh kecamatan adalah jumlah industri per luas kecamatan.

5. Intensitas Lahan Pertanian

Dilihat dari segi fisik, terdapat perbedaan mencolok yang membedakan kawasan berciri-ciri perdesaan dan perkotaan. Mc Gee (1991) menyatakan bahwa di desa tersedia banyak lahan tidak terbangun yang biasanya digunakan sebagai objek kolonialisasi /pembebasan lahan oleh pengembang. Lahan-lahan kosong ini digunakan untuk kegiatan pertanian masyarakat. Semakin dekat dengan kawasan inti kota, intensitas lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Kondisi ini terjadi di kawasan pinggiran perkotaan karena dipengaruhi oleh adanya konversi lahan, dari lahan agrikultur menjadi industri dan perumahan. (Webster, 2002). Perbedaan karakteristik ini menjadi landasan dalam menjadikan data intensitas lahan pertanian sebagai variabel dalam prosedur deliniasi. Kegiatan pertanian terdiri dari berbagai sektor diantaranya pertanian lahan basah (sawah), perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan Namun, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data pertanian lahan basah (sawah) sebab menurut Mc Gee (1991) kegiatan pertanian yang khas di Pulau Jawa adalah tumbuhan padi (sawah). Satuan yang digunakan adalah luas sawah per jumlah penduduk (m^2 /penduduk).

6. Ketersediaan Fasilitas (sarana pendidikan dan kesehatan)

Hugo (1987) menyatakan bahwa klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan dapat dibedakan menurut akses pada jasa dan informasi. Untuk kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan, akses masyarakat terhadap jasa dan informasi semakin tinggi. Sedangkan, untuk kawasan perdesaan akses terhadap jasa dan informasi menjadi semakin rendah. Mc Gee (1991) menyatakan bahwa kawasan pinggiran memiliki akses *commuting* (ulang

alok) yang tinggi sehingga sarana prasarana kawasan pinggiran akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ulang alok. Diantara berbagai jenis sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan merupakan fasilitas-fasilitas sosial utama yang memiliki nilai yang penting terhadap masyarakat. Karena pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi penting terhadap masyarakat, maka kedua jenis sarana prasarana ini dianggap paling stabil dan representatif dibandingkan jenis sarana prasarana lainnya. Oleh sebab itu, kedua variabel tersebut akan digunakan sebagai pengukur yang mewakili tingkat akses masyarakat kota, desa, dan pinggiran terhadap sarana prasarana. Satuan yang digunakan pada variabel ini sebagai pembakuan untuk seluruh kecamatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketersediaan sarana per jumlah pelayanan minimum} = \frac{a}{b} \times c$$

Keterangan:

a = Total Jumlah sarana pendidikan atau sarana kesehatan

b = Jumlah penduduk Kecamatan

c = Standar minimum penduduk yang dilayani (Dep. Pekerjaan Umum)

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan SMP, SMA dan puskesmas dihitung dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (*Jumlah Luas Kebutuhan Minimum Fasilitas Lingkungan atas dasar Jumlah Minimum Penduduk Pendukungnya*). Kebutuhan sarana dihitung dengan menggunakan standar jumlah penduduk pendukung sebagai berikut:

- 1 Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Menengah Umum per 6000 penduduk
- 1 Puskesmas tingkat kelurahan per 30.000 penduduk
- 1 Rumah Sakit Wilayah Tipe B per 1.500.000 penduduk

Setelah variabel-variabel melewati proses seleksi berdasarkan kajian literatur dan analisis, maka variabel tersebut selanjutnya diuji kelayakannya lalu dikelompokkan ke dalam faktor-faktor. Berdasarkan pengujian KMO dan Bartlett's, ketujuh variabel ini memiliki nilai 0,755 dan nilai signifikansi 0 sehingga sangat

layak untuk digunakan dalam analisis faktor dan kluster.¹ Berdasarkan perhitungan analisis faktor (PCA), ketujuh variabel ini dikelompokkan ke dalam dua faktor yang dapat menjelaskan sekitar 59,181% dari tujuh variabel yang ada. Ketujuh variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL IV.1
FAKTOR PENENTU

Variabel	Faktor 1	Faktor 2
Rasio Keluarga Pra Sejahtera	0,853	-0,810
Kepadatan Penduduk	-0,837	0,206
Luas Sawah per Kapita	0,813	0,145
Angka Beban Tanggungan	0,541	-0,465
Rasio Industri Sedang dan Besar	-0,486	0,770
Rasio Ketersediaan sarana pendidikan	0,186	0,834
Rasio Ketersediaan Sarana Kesehatan	-0,426	0,566
% Variansi	42,612 %	16,569%

Sumber: Hasil pengolahan dengan SPSS

Dari tabel IV.1, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai yang paling tinggi terhadap faktor 1 adalah rasio keluarga pra sejahtera, kepadatan penduduk, luas sawah per kapita, angka beban tanggungan serta rasio industri sedang dan besar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor yang terbentuk mewakili informasi yang tinggi mengenai kondisi sosial-ekonomi. Oleh sebab itu faktor 1 diberi nama dengan sebutan "Faktor Sosial Ekonomi". Faktor ini memiliki kontribusi yang penting terhadap analisis sebab ketujuh variabel input dapat dijelaskan sebanyak 42,612% oleh faktor ini.

Di sisi lain, variabel yang memiliki nilai tinggi terhadap faktor 2 adalah variabel rasio ketersediaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Faktor ini diberi nama dengan sebutan "Faktor Sarana Prasarana (fisik)". Faktor ini dapat menjelaskan 16,6% dari ketujuh variabel.

¹ Syaratnya, nilai KMO > 0,5 dengan signifikansi < 0,05

4.2 Identifikasi Delineasi Kawasan Peri-Urban Jabodetabekjur

Identifikasi area peri-urban di kawasan metropolitan Jabodetabekjur dilakukan melalui pengelompokan 141 objek yang saling independen dengan melihat pola tingkat keseragaman (*similarity*) kecamatan-kecamatan tersebut. Dasar dalam mengukur tingkat keseragaman ditentukan oleh kedua faktor yang dihasilkan dalam analisis faktor pada tahap sebelumnya. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya, dalam penelitian ini, DKI Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan yang teritegrasi. Secara kontekstual, DKI Jakarta memiliki batasan fungsional yang melebihi batas administrasi sehingga kawasan tersebut merupakan kawasan yang bersifat homogen baik dari segi sosial-ekonomi maupun fisik. Selain itu, bila dilihat dari segi teknis, kecamatan-kecamatan yang ada di dalam DKI Jakarta memiliki distribusi data yang timpang (*outliers*) dengan kecamatan-kecamatan lain di luar DKI Jakarta, hal ini akan mempengaruhi tingkat kecenderungan pengelompokan analisis klaster yang dilakukan oleh SPSS. Semakin banyak *outliers*, maka akan mengurangi kecenderungan pengelompokan untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Oleh sebab itu, DKI Jakarta harus dipandang sebagai satu kawasan yang terintegrasi.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian pemilihan metode, teknik analisis pengelompokan yang dipilih adalah teknik analisis hierarki aglomeratif yang akan membentuk semacam "pohon" dimana ada hierarki/tingkatan yang jelas antar obyek, dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Teknik klaster ini dipilih karena tujuan analisis adalah ingin melihat bagaimana proses transisi antar klaster dan bagaimana relevansinya dengan literatur dan kesesuaian kondisi di Jabodetabekjur. Jumlah klaster yang paling relevan akan dipilih sebagai dasar dalam menentukan hierarki klasifikasi kawasan metropolitan yang didalamnya memuat kelompok kawasan dengan ciri-ciri peri-urban.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah klaster yang memiliki tingkat kemungkinan yang paling tinggi untuk diadaptasi di Jabodetabekjur adalah klaster 3 dan 4. Hal ini dapat dilihat dari hasil klaster yang sudah disajikan dalam bentuk spasial. Klaster yang berjumlah lima ke atas memiliki pola yang aneh, dimana terdapat kecamatan-kecamatan yang dikelompokkan ke dalam satu kelompok tetapi

tidak memiliki kesamaan karakteristik baik dari sisi fungsi maupun spasialnya. Oleh sebab itu, klaster lima ke atas akan diekstraksi dan kemungkinan terbesar jumlah klaster yang diadaptasi dalam penelitian ini adalah klaster 3 dan 4.

Gambaran spasial untuk hasil analisis pengelompokan yang memiliki jumlah kelompok 3 hingga 5 tertera dalam LAMPIRAN D. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok yang dibentuk oleh analisis klaster membentuk pola-pola spasial. Untuk mempermudah analisis selanjutnya, kelompok-kelompok ini dapat diberi nama yang bersifat "sementara" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan spasial. DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan yang secara fungsional sudah melebihi batasan administrasinya. Hal ini mengakibatkan fungsi-fungsi perkotaan yang ada di DKI Jakarta melebar hingga ke kawasan yang berbatasan langsung dengan batas administrasi DKI Jakarta. Artinya, Kecamatan-kecamatan yang berada pada kelompok yang sama dengan DKI Jakarta merupakan kawasan yang memiliki ciri-ciri perkotaan. Kelompok ini dapat disebut dengan kelompok "kota inti". Kelompok selanjutnya merupakan kelompok yang berbatasan langsung dengan kelompok kota inti. Kelompok ini dapat diberi nama kelompok "kawasan pinggiran". Sedangkan, untuk kelompok yang terletak jauh dari kelompok kota inti dapat diberi nama kelompok "desa".

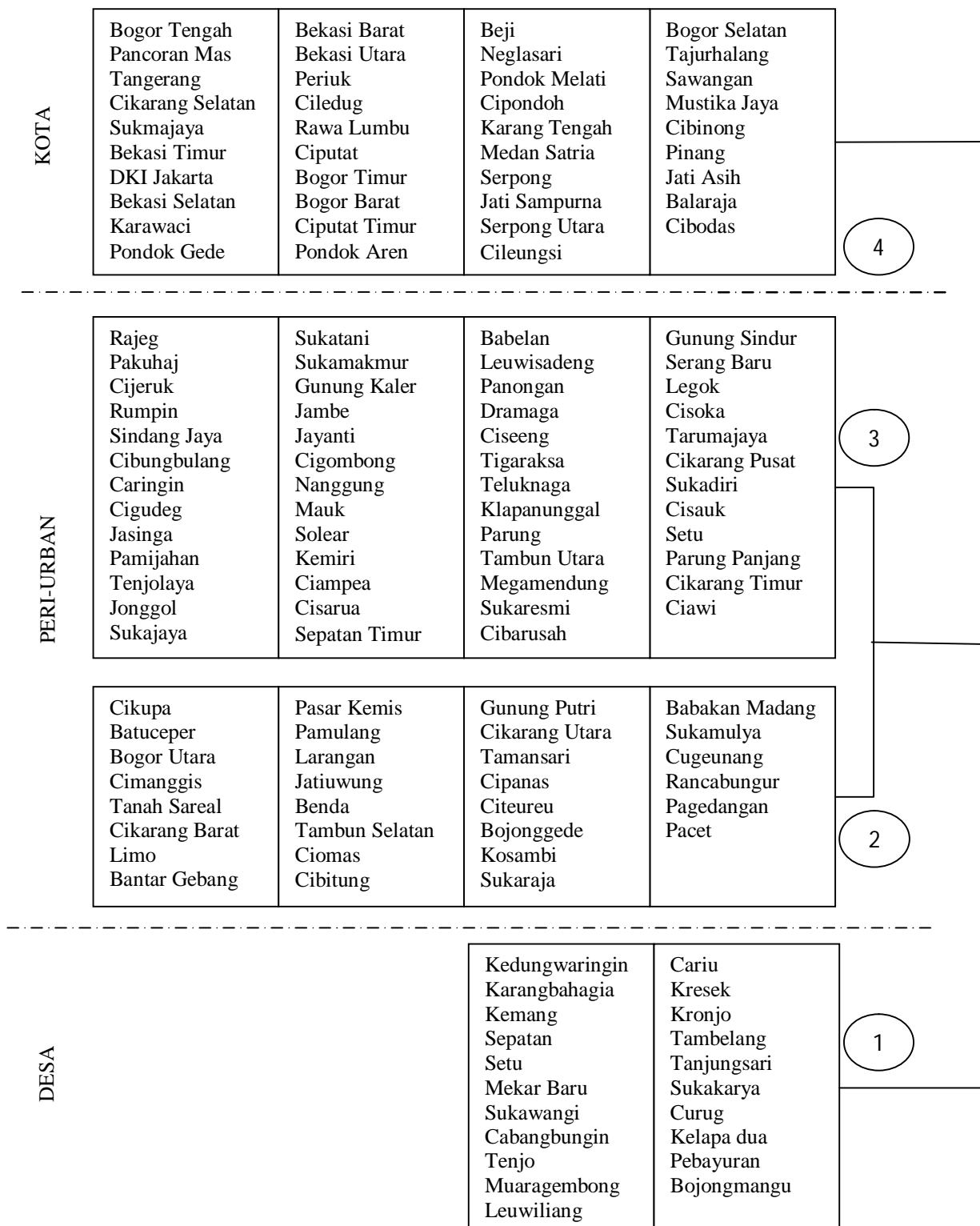
Pada Gambar 4.2, bila dilihat dari pola transisinya, kelompok yang terpecah didalam transisi klaster tiga dan empat merupakan kelompok 2 dan 3. Sedangkan kelompok 1 dan 4 lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan transisi jumlah klaster. Pola transisi ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa kelompok kawasan pinggiran memiliki kecenderungan untuk memiliki hierarki tersendiri. Artinya, hasil analisis dengan jumlah 4 klaster memiliki kesamaan dengan model tipologi kawasan pinggiran *Budi Tjahjati*. Model ini membagi kawasan pinggiran ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok *predominantly urban*, *semi urban*, dan *potential urban*. Berdasarkan model tersebut, kawasan *predominantly urban* merupakan kawasan yang didominasi oleh kondisi dan kegiatan berciri perkotaan. Karakteristik kawasan ini antara lain adalah perumahan berkepadatan tinggi, penggunaan lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta industri ringan/manufaktur. Kegiatan-kegiatannya lebih berciri

perkotaan, biasanya akses ke kota inti relatif baik. Kelompok selanjutnya adalah kawasan *semi-urban*. Kawasan *semi-urban* merupakan kawasan yang memiliki ciri-ciri transisi desa ke kota. Model tersebut menyatakan bahwa kawasan peri-urban termasuk ke dalam kelompok *semi-urban* karena merupakan tahap awal dari proses suburbanisasi. Kelompok yang terakhir, *potential urban*, merupakan berciri utama perdesaan tapi mempunyai peluang besar untuk lambat laun menjadi urban. Kawasan ini tidak berbatasan langsung ke kota inti, namun dekat dengan kawasan semi urban.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa model tipologi kawasan pinggiran kurang relevan dengan hasil analisis dalam penelitian ini. Model Tipologi Kawasan Pinggiran menyatakan bahwa kawasan pinggiran yang memiliki ciri perkotaan (*predominantly urban*) merupakan kawasan yang tidak berada dalam satu hierarki dengan kawasan kota inti. Sedangkan, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan informasi yang berbeda. Dapat dilihat dalam peta hierarki 3 klaster bahwa kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan kota inti (DKI Jakarta) termasuk ke dalam hierarki kelompok yang sama dengan kota inti. Selain itu, bila dilihat dari nilai *faktor loading-nya* (LAMPIRAN C), kecamatan-kecamatan yang berada di dalam kelompok 3 (kelompok kota) memiliki nilai keseragaman (*similaritas*) yang tinggi. Hal ini juga ditunjukkan oleh pohon hierarki klaster di dalam Gambar 4.2. Kelompok kecamatan yang cenderung tidak stabil di dalam transisi pemilihan jumlah klaster adalah kelompok "peri-urban", dan bukan kelompok "kota".

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka model klasifikasi dengan jumlah 4 kelompok tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. Oleh sebab itu, hasil analisis klaster yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model klasifikasi dengan jumlah 3 kelompok. Setelah didapatkan jumlah kelompok yang paling sesuai, maka dilakukan interpretasi untuk menentukan nama kelompok disesuaikan dengan ciri-ciri dari literatur dan model klasifikasi yang telah ada.

GAMBAR 4.2
POHON HIERARKI BATAS 4 KLASTER



Sumber: Hasil Pengolahan dengan SPSS, 2010

Model klasifikasi yang dapat diadaptasi pada hasil penelitian ini adalah model klasifikasi wilayah Mc Gee yang membagi klasifikasi mega-urban ke dalam 5 kelompok yaitu:

- Kota besar: mendominasi kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut yang terdiri dari satu atau dua kota yang sangat besar
- Wilayah pinggiran kota: mengelilingi kota besar dengan ciri terjadi penglaju harian untuk mencapai pusat kota, yang jaraknya berkisar hingga 30 kilometer dari pusat kota
- Desakota: terdapat kegiatan campuran antara pertanian dan non-pertanian, yang biasanya terdapat di sepanjang koridor antara dua kota besar, yang dicirikan dengan populasi penduduk padat dan bermata pencaharian petani padi sawah
- Desa dengan kepadatan penduduk tinggi, dengan basis perekonomiannya pada pertanian padi sawah; dan
- Desa dengan kepadatan penduduk rendah, yang tersebar di luar keempat wilayah yang telah disebutkan di atas.

Namun, dengan melihat kesesuaian dengan kasus Jabodetabekjur, jumlah kelompok disederhanakan menjadi tiga kelompok saja, yaitu kelompok kota inti, kelompok peri-urban dan kelompok desa. Hal ini disebabkan karena penelitian ini ingin melihat kawasan pinggiran sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, desa-kota yang merupakan bagian dari kawasan peri-urban dapat disatukan ke dalam satu kelompok. Kelompok desa kepadatan penduduk rendah dan tinggi dijadikan sebagai satu kesatuan sebab penelitian ini tidak hanya menggunakan komponen demografi saja tetapi juga mempertimbangkan komponen ekonomi dan fisik.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, berikut ini merupakan klasifikasi metropolitan Jabodetabekjur dilihat menurut pola spasialnya:

1. Kelompok 1 : Kelompok Desa

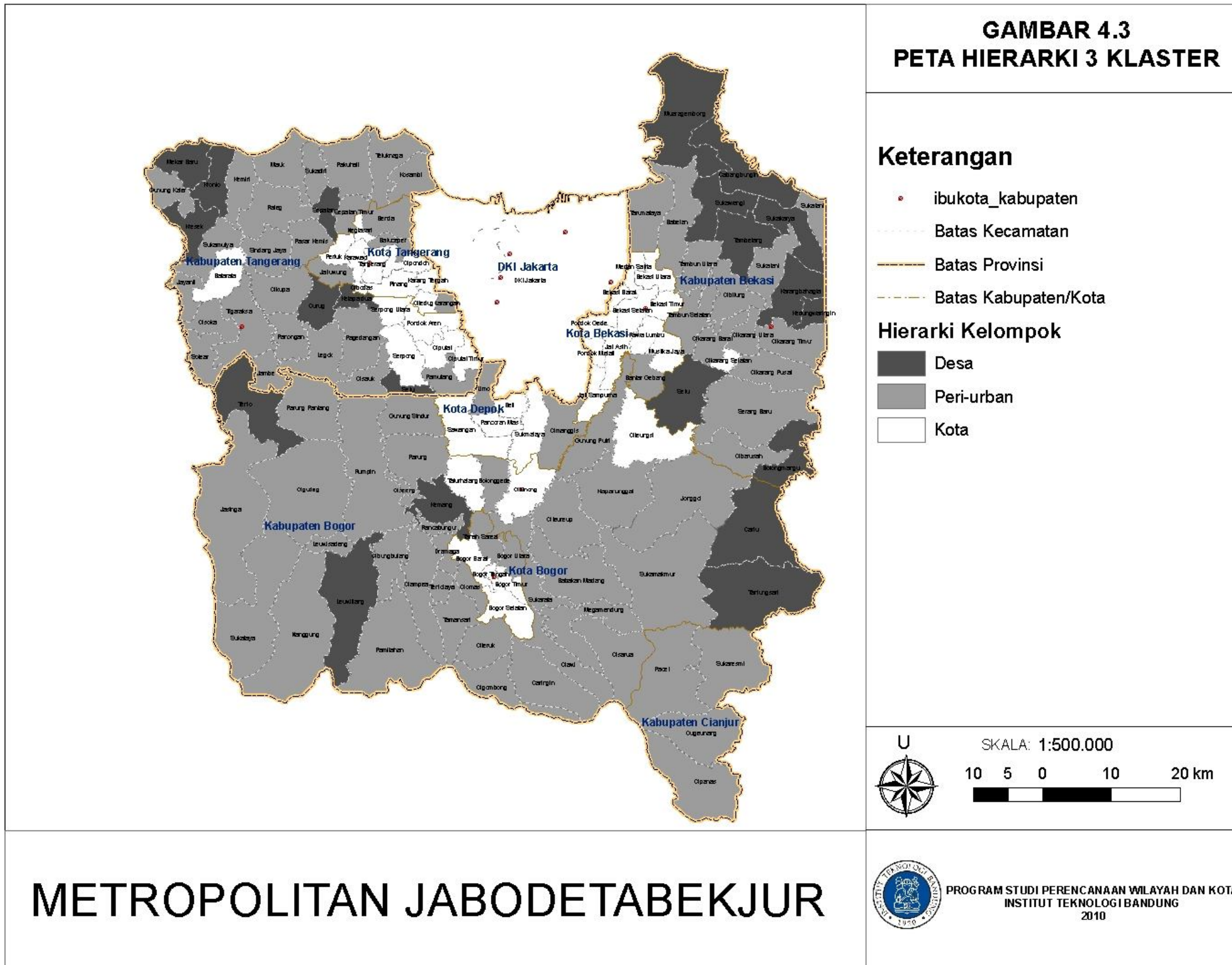
Kelompok ini terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berada di bagian terluar kawasan metropolitan Jabodetabekjur. Secara geografis, kecamatan-kecamatan di dalam kelompok ini terletak jauh dari kota inti (kelompok 3).

2. Kelompok 2: Peri-urban

Kelompok ini terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan kota inti. Kelompok ini menunjukkan zona transisi antara kelompok kota inti (kelompok 3) dan kelompok desa (kelompok 1). Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kelompok ini umumnya merupakan kecamatan-kecamatan yang secara administratif berada di dalam kabupaten.

3. Kelompok 3: Kota Inti

Kelompok ini terdiri dari provinsi DKI Jakarta dan 3 kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta secara spasial, yaitu kota Tangerang, Kota Depok dan Kota Bekasi.



Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan hasil analisis pengelompokan yang ditunjukkan oleh gambar 4.3, dapat dilihat bahwa kedekatan spasial memang berpengaruh terhadap karakteristik sosial, ekonomi fisik yang menentukan kelompok-kelompok hierarki metropolitan. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan klasifikasi pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Namun, kedekatan spasial tersebut tidak semata-mata berlaku mutlak untuk setiap kecamatan. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan di dalam batas administrasi kota (kota tangerang dan kota depok) yang berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta namun tidak berada pada kelompok kota inti. Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Larangan, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Benda di Kota Tangerang, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cimanggis di Kota Depok. Bila dilihat dari pola spasialnya kecamatan-kecamatan tersebut memang seharusnya berada dalam satu kelompok dengan kota inti. Namun, terdapat beberapa perbedaan karakteristik sosial, ekonomi dan fisik yang mengakibatkan kecamatan-kecamatan tersebut berbeda dengan kecamatan-kecamatan disekelilingnya. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penentu klasifikasi metropolitan tidak hanya ditentukan oleh aspek spasial saja tetapi juga oleh karakteristik nonspasialnya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah alat analisis pengelompokan SPSS sudah menempatkan kecamatan-kecamatan tersebut dalam kelompok yang benar maka dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dengan memperhatikan seluruh variabel sosial, ekonomi dan fisiknya dan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan disekitarnya. Untuk mempermudah proses analisis, maka telah dilakukan perhitungan manual mengenai rentang masing-masing variabel untuk tiap kelompok. Rentang penilaian tersebut kemudian digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat kecamatan tersebut dengan variabel-variabel yang ada. Analisis per variabel tersebut kemudian digunakan untuk mengukur kelayakan kecamatan-kecamatan transisi di dalam kelompok yang ditentukan oleh analisis statistik pengelompokan. Selain itu, perlu diingatkan kembali bahwa berdasarkan hasil analisis faktor, faktor Sosial Ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Faktor Sarana Prasarana.

TABEL IV.2
RENTANG RATA-RATA PENILAIAN KECAMATAN

Kelompok	Kepadatan Penduduk	Angka Beban Tanggungan	Rasio Keluarga Pra Sejahtera	Rasio Sarana Kesehatan	Rasio sarana pendidikan	Luas Sawah per Kapita	Rasio Industri Sedang dan Besar
Kota	8854	45,77	14,91	56,05	1,31	57,95	11,19
Peri-Urban	7549,50	83,52	31,21	11,97	0,70	291,37	4,14
Desa	2955	52,25	38,46	28,13	2,24	538,23	2,70

Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009

Berikut ini merupakan penjelasan sosial ekonomi dan fisik bagi kecamatan-kecamatan peri-urban yang bila dilihat dari pola spasial memiliki kedekatan dengan kota inti namun termasuk ke dalam kelompok peri-urban (berada dalam proses transisi dengan kota inti):

1. Kecamatan Larangan (Kota Tangerang)

Kecamatan Larangan berbatasan langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan yang tinggi yaitu sebesar 14641 jiwa/km². Angka ini relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan disekitarnya yang termasuk ke dalam kategori Kota Inti. Tingkat Dependency Ratio (36,53) dan Rasio Keluarga Pra Sejahtera (4,21) pun menunjukkan angka yang relatif lebih dekat ke rentang kelompok kota inti dibandingkan dengan rentang kelompok peri-urban. Namun, bila dilihat dari sisi fisiknya, Kecamatan Larangan memiliki tingkat rasio pelayanan sarana kesehatan (11,55) dan pendidikan (0,305) yang rendah bila dibandingkan kecamatan-kecamatan disekitarnya. Tingkat rasio sarana fisik kecamatan Larangan masih termasuk ke dalam kelompok peri-urban. Selain itu, bila dilihat dari karakteristik ekonominya, kecamatan ini menunjukkan kegiatan industri dan pertanian rendah. Kecamatan Larangan tidak memiliki lahan pertanian padi. Bahkan rasio industri sedang dan

besarnya (1,6) lebih mendekati rentang kelompok desa. Dari penilaian di atas, kecamatan Larangan memang tidak bisa dikategorikan ke dalam kelompok kota inti karena rasio ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah serta rasio industri sedang dan besar yang rendah pula.

2. Kecamatan Batuaceper (Kota Tangerang)

Kecamatan Batuaceper terletak berbatasan langsung dengan kota administrasi Jakarta Barat. Meskipun memiliki kedekatan spasial dengan kota inti, namun kecamatan ini memang tergolong ke dalam kelompok peri-urban. Hal ini dikarenakan kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan (6868 jiwa/km^2) yang masih tergolong ke dalam rentang kelompok peri-urban. Selain itu, rasio ketersediaan sarana prasarana serta rasio industri sedang besar (6,74) kecamatan ini pun memang masih berada dalam rentang kelompok peri-urban. Ciri-ciri perkotaan dari kecamatan ini hanya ditunjukkan oleh variabel angka beban tanggungan (42,27) , rasio pra keluarga sejahtera (5,32) dan luas sawah per kapita ($3,14 \text{ m}^2/\text{jiwa}$). Namun, angka ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena berdasarkan analisis faktor, variabel yang memiliki tingkat persentase representasi yang paling berpengaruh adalah kepadatan penduduk.

3. Kecamatan Benda (Kota Tangerang)

Kecamatan Benda berbatasan langsung dengan Jakarta Barat. Kecamatan ini tidak termasuk ke dalam kategori kota inti karena meskipun kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (11234 jiwa/km^2) dan mendekati rentang kota inti, namun hal ini tidak diseimbangi oleh ketersediaan fasilitas sosial utama yaitu kesehatan (1,8) dan pendidikan (0,27). Tingkat luas sawah perkapita ($26,16 \text{ m}^2/\text{jiwa}$) pun menunjukkan nilai yang berada dalam rentang kawasan peri-urban. Selain itu, tidak ada nilai ekstrim pada rasio industri sedang dan besar (6,76). Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi kecamatan Benda berada dalam kombinasi industri dan pertanian, artinya kecamatan ini memang berada dalam kelompok peri-urban dan bukan dalam kelompok kota inti.

4. Kecamatan Limo dan Cimanggis (Kota Depok)

Kecamatan Limo dan Cimanggis berbatasan secara langsung dengan kota administrasi Jakarta Selatan. Meskipun dua kecamatan ini memiliki kedekatan spasial dengan DKI Jakarta, namun bila dilihat dari karakteristik sosial ekonomi dan fisik kedua kecamatan ini memang termasuk ke dalam kelompok peri-urban. Penyebabnya adalah kedua kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi dan masih di dalam rentang kelompok peri-urban. Selain itu, bila dilihat dari karakteristik sosialnya, kedua kecamatan ini pun memiliki tingkat beban tanggungan dan rasio keluarga pra sejahtera yang sedang. Kegiatan ekonomi di kecamatan-kecamatan ini pun seimbang antara kegiatan industri dan pertanian sehingga kecamatan Limo dan Cimanggis ini memang sesuai berada di dalam kelompok peri-urban.

Pola transisi tidak hanya dialami oleh kecamatan-kecamatan peri-urban yang memiliki kedekatan spasial dengan kota inti. Kecamatan-kecamatan didalam kelompok desa pun mengalami pola transisi terhadap kelompok peri-urban. Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya:

1. Kecamatan Kelapa dua (Kabupaten Tangerang)

Analisis pengelompokan dengan SPSS menunjukkan bahwa kecamatan Kelapa dua termasuk ke dalam kelompok desa. Namun, bila dilihat dari aspek spasial maupun non spasial kecamatan ini lebih sesuai berada di dalam kelompok peri-urban. Bila dilihat dari pola spasial, Kecamatan Kelapa dua berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam kelompok kota inti dan peri-urban. Dilihat dari karakteristik demografi, kecamatan Kelapa dua memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sedang (5632 jiwa/km^2) dan mendekati rentang kelompok peri-urban. Begitu juga dengan tingkat beban tanggungan (48,13) dan keluarga pra sejahteranya (3,91) yang menunjukkan angka yang kecil. Hal ini menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan ciri-ciri perdesaan. Artinya, karakter sosial kecamatan kelapa dua lebih menyerupai ciri-ciri

kelompok peri-urban. Bila dilihat dari karakteristik ekonomi, kecamatan kelapa dua memiliki kegiatan industri (1,35) dan pertanian yang seimbang (4,73 m²/jiwa). Hal ini semakin memperkuat bahwa kecamatan kelapa dua termasuk ke dalam kelompok peri-urban. Ciri-ciri perdesaan kelapa dua hanya ditunjukkan oleh rasio ketersediaan sarana pendidikan (3,845) saja yang nilainya lebih dekat dengan rentang kelompok desa.

2. Kecamatan Sepatan (Kabupaten Tangerang)

Dilihat dari aspek spasial, kecamatan sepatan berbatasan langsung dengan kecamatan kota inti dan peri-urban yang berada di Kota Tangerang. Bila dilihat dari struktur demografinya, kecamatan sepatan memiliki tingkat kepadatan penduduk (4432 jiwa/km²) dan angka beban tanggungan (55,95) yang dekat dengan rentang kelompok desa. Artinya, bila dilihat dari aspek demografi kecamatan sepatan memang sesuai berada di kelompok desa. Namun, bila dilihat dari rasio keluarga pra sejahtera (22,42) dan rasio ketersediaan sarana kesehatan (0,39), kecamatan sepatan berada dalam rentang kelompok peri-urban. Kegiatan ekonomi kecamatan Sepatan pun memiliki kombinasi antara pertanian dan industri. Hal ini dapat dilihat dari data sawah perkapita (160 m²/jiwa) dan rasio industri sedang dan besar (1,85). Namun hal ini tidak berdampak signifikan berdasarkan analisis faktor, variabel yang memiliki tingkat representasi yang paling berpengaruh adalah kepadatan penduduk.

3. Kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang)

Kecamatan Curug memiliki tingkat kepadatan penduduk (5140 jiwa/km²) yang berada diantara rentang kelompok peri-urban dan desa. Dilihat dari angka beban tanggungan (47,87) dan ketersediaan sarana pendidikan (3,49) kecamatan curug memiliki nilai yang dekat dengan rentang kelompok desa. Namun, bila dilihat dari rasio industri sedang dan besar (5,4) serta luas sawah perkapita (18,1 m²/jiwa), kecamatan ini bisa dikategorikan ke dalam rentang peri-urban. Bila dilihat dari keseluruhan karakteristik, maka kecamatan curug ini lebih cenderung mendekati karakteristik kelompok desa

walaupun kecamatan ini memiliki rasio industri sedang dan besar yang tinggi. Artinya, kecamatan ini telah sesuai berada dalam kelompok desa.

4. Kecamatan Setu (Kabupaten Bekasi)

Kecamatan Setu merupakan kecamatan berkarakteristik desa yang berada di sekeliling kecamatan yang berkarakteristik peri-urban. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kepadatan penduduk kecamatan setu yang rendah yaitu sebesar 3700 jiwa/km² dimana angka ini mendekati rentang kelompok desa. Selain itu, tingkat beban tanggungan kecamatan ini pun tinggi dan mendekati rentang kelompok desa. Dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan pun, kecamatan Setu memiliki nilai yang berada di dalam rentang kelompok desa. Bila dilihat dari kegiatan perekonomian pun, kecamatan ini memiliki rasio industri sedang dan besar dengan nilai 0. Sedangkan , untuk kegiatan pertanian, luas sawah per kapitanya adalah 4,3 m²/jiwa. Dengan melihat keseluruhan karakteristik maka kecamatan Setu memang sesuai dengan kelompok desa.

5. Kecamatan Kemang (Kabupaten Bogor)

Secara spasial, kecamatan Kemang merupakan kecamatan berkarakteristik desa yang terletak diantara kecamatan-kecamatan yang berkarakteristik peri-urban. Namun, bila dilihat dari sudut pandang sosial,ekonomi dan fisik, kecamatan ini memang sesuai berada di dalam kelompok desa. Bila dilihat dari sudut pandang demografi, tingkat kepadatan penduduk kecamatan Kemang sangat rendah, bahkan berada di dibawah rentang rata-rata kepadatan penduduk pada kelompok desa. Selain itu, bila dilihat dari kondisi sosialnya, tingkat beban tanggungan dan perbandingan jumlah keluarga pra sejahtera terhadap jumlah keluarga menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini merupakan ciri-ciri dari kecamatan yang berkarakteristik desa. Kegiatan perekonomian Kecamatan Kemang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian daripada industri. Hal ini dapat dilihat dari angka luas lahan sawah per kapita yaitu 50,81 m²/jiwa dan rasio industri sedang dan besar sebesar 0,24 yang berada di bawah rentang rasio industri untuk

kelompok desa. Oleh sebab itu, kecamatan Kemang memang sudah sesuai berada di dalam kelompok kecamatan yang berkarakteristik desa.

Berdasarkan penilaian diatas, maka kecamatan-kecamatan transisi yang membutuhkan penyesuaian adalah Kecamatan Kelapa dua, yang lebih tepat berada dalam kelompok peri-urban daripada kelompok desa.

4.3 Karakteristik Kawasan Peri-urban dalam Konstelasi Metropolitan Jabodetabekjur

Kelompok-kelompok yang dihasilkan oleh analisis pengelompokan tidak hanya bisa dibedakan dari pola spasialnya saja tetapi juga dari struktur demografis dan ekonominya. Berikut ini merupakan karakteristik kawasan peri-urban Jabodetabekjur berdasarkan indikator fisik dan sosial ekonomi:

4.3.1 Indikator Fisik

Bila dilihat dari indikator fisik, kawasan peri-urban Jabodetabekjur memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan kawasan desa dan kota inti. Kawasan peri-urban Jabodetabekjur mengalami peningkatan kawasan terbangun yang menyebabkan kawasan tersebut memiliki kombinasi antara guna lahan pertanian dan nonpertanian.

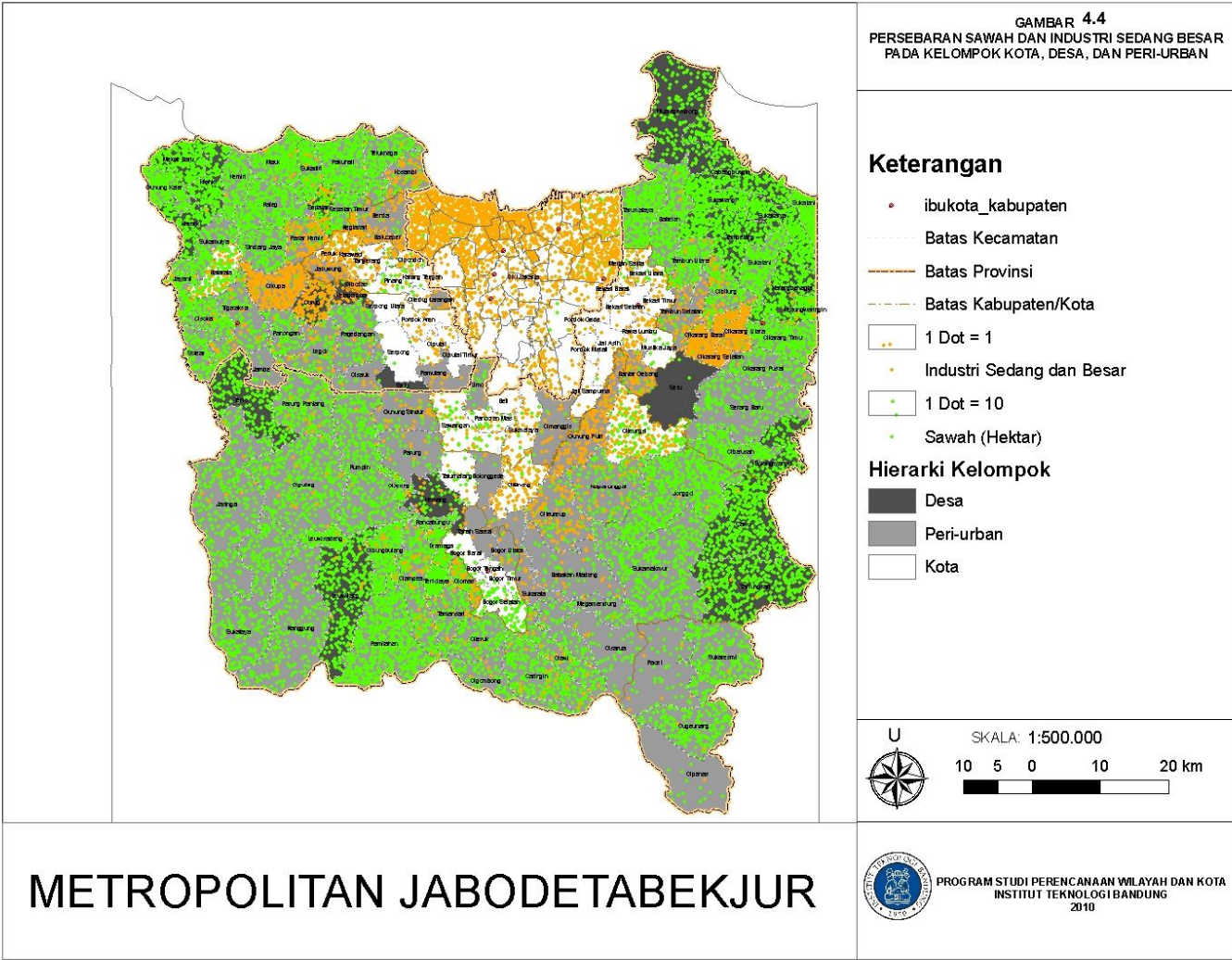
Peningkatan kegiatan nonpertanian di kawasan peri-urban secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan akan sarana prasarana sosial dan perumahan. Sebagai kawasan tujuan migrasi, kelompok peri-urban memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks. Tabel IV.3 menunjukkan bahwa tingginya jumlah penduduk di kelompok peri-urban tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan pemenuhan infrastruktur sosial dasar. Secara umum, keberadaan fasilitas-fasilitas sosial utama di Metropolitan Jabodetabekjur, diantaranya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, masih memusat di Kota Inti. Namun, tingginya ketersediaan sarana prasarana sosial dasar di kota inti dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat akibat kepadatan jumlah penduduk di Kota Inti. Sebaliknya, jumlah penduduk yang

relatif rendah di kawasan perdesaan Jabodetabekjur mengakibatkan *supply* sarana prasarana menjadi berlebih. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi di kawasan peri-urban, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar seharusnya dibangun untuk memenuhi permintaan masyarakat yang juga meningkat di kawasan peri-urban. Penyediaan sarana prasarana dasar di kawasan pinggiran pun dapat digunakan sebagai insentif untuk mengendalikan ledakan penduduk di kota inti.

TABEL IV.3
STRUKTUR SARANA PRASARANA TIGA KELOMPOK
METROPOLITAN JABODETABEKJUR

NAMA CLUSTER	JUMLAH PENDUDUK	RASIO SARANA KESEHATAN	RASIO SARANA PENDIDIKAN
cluster 1 (desa)	1408554	10,12	1,87
cluster 2 (peri-urban)	8982930	4,62	0,63
cluster 3 (kota)	13590953	28,21	1,11

Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009



Peningkatan kegiatan ekonomi nonpertanian di kawasan peri-urban menyebabkan beberapa bangkitan penggunaan lahan di sekitar kawasan tersebut. Salah satu dari bangkitan tumbuhnya kegiatan di kawasan peri-urban adalah pembangunan perumahan dalam skala besar.

TABEL IV.4
PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA BESAR
DI WILAYAH JABOTABEK
TAHUN 1997

NO	NAMA	LUAS (HA)	LOKASI
1	Milik PT Pembangunan Delta Bekasi	1.500	Kab. Bekasi
2	Milik PT Lippo City Development	780	Kab. Bekasi
3	Milik PT Pura Delta Bekasi	1.500	Kab. Bekasi
4	Cikarang Baru	1.400	Kab. Bekasi
5	Bekasi Matra Real Estate	500	Kab. Bekasi
6	Milik PT Dwigunatama Rintisprima	850	Kab. Bekasi
7	Kota Legenda (Bekasi 2000)	2.000	Kab & Kot. Bekasi
8	Milik PT Sinar Bahana Mulia	800	Kab. Bekasi
9	Pantai Modern	500	Kab. Bekasi
10	Lippo Cikarang	3.000	Kab. Bekasi
11	Harapan Indah	800	Kab. Bekasi
12	Bukit Jonggol Asri	30.000	Kab. Bogor
13	Citra Indah	1.000	Kab. Bogor
14	Kota Taman Metropolitan	600	Kab. Bogor
15	Kota Wisata	1.000	Kab. Bogor
16	Bukit Sentul	2.000	Kab. Bogor
17	Rancamaya	500	Kab. Bogor
18	Resort Danau Lido	1.700	Kab. Bogor
19	Taruma Resort	1.100	Kab. Bogor
20	Talaga Kahuripan	750	Kab. Bogor
21	Kota Tenjo	3.000	Kab. Bogor
22	Milik PT Bangun Jaya Triperkasa	500	Kab. Bogor
23	Maharani Citra Pertiwi	1.679	Kab. Bogor
24	Milik PT Banyu Buana Adhi Lestari	500	Kab. Bogor
25	Kotabaru Tigaraksa	3.000	Kab. Tangerang
26	Puri Jaya	7.145	Kab. Tangerang
27	Citra Raya	3.000	Kab. Tangerang
28	Lippo Karawaci	2.000	Kab. Tangerang
29	Gading Serpong	1.500	Kab. Tangerang
30	Alam Sutera	700	Kab. Tangerang
31	Bumi Serpong Damai	6.000	Kab. Tangerang

NO	NAMA	LUAS (HA)	LOKASI
32	Bintaro Jaya	2.321	Kab. Tangerang
33	Kota Modern	770	Kab. Tangerang
34	Kota Wisata Teluk Naga	8.000	Kab. Tangerang
35	Kota Jaya	1.745	Kab. Tangerang
36	Pantai Indah Kapuk	800	DKI Jakarta

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2007

Dilihat dari tabel IV.4, dapat dilihat bahwa pembangunan permukiman baru di Jabodetabekjur sebagian besar terjadi di kawasan peri-urban. Perkembangan permukiman skala besar ini ditandai oleh pesatnya permintaan akan lahan untuk kegiatan usaha atau tempat hunian, khususnya kawasan perumahan sebagai akibat perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Kota Jakarta. Oleh sebab itu, perkembangan permukiman yang ada di kawasan peri-urban tersebut umumnya masih punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap DKI Jakarta.

Dilihat dari indikator fisik, dapat dilihat bahwa fenomena peri-urbanisasi mengakibatkan perubahan kegiatan untuk ketiga kelompok hierarki metropolitan Jabodetabekjur. Kelompok kota inti mengalami peningkatan industri jasa dan perdagangan serta industri manufaktur. Sedangkan kawasan peri-urban mengalami peningkatan permukiman dan industri pengolahan untuk memenuhi kebutuhan dari kota inti. Kelompok kecamatan-kecamatan yang berkarakteristik desa mulai mengalami peningkatan industri manufaktur yang mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan. Pada akhirnya, perubahan pada ketiga kelompok hierarki metropolitan Jabodetabekjur ini sama-sama menunjukkan pola yang sama yaitu terjadinya peningkatan kegiatan non-agraris.

4.3.2 Indikator Sosial

Dilihat dari aspek demografinya, kawasan peri-urban menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang cenderung berbeda dengan kawasan kota inti. Kawasan peri-urban menunjukkan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sedangkan pertumbuhan penduduk di Kota inti mulai mengalami

masa-masa yang stabil. Tingginya peningkatan kepadatan penduduk yang relatif cepat di kawasan kawasan peri-urban ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL IV.5
STRUKTUR SOSIAL TIGA KELOMPOK
METROPOLITAN JABODETABEKJUR

NAMA CLUSTER	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/hektar)	MIGRASI NETTO²	RASIO PRA KS	ANGKA BEBAN TANGGUNGAN
cluster 1 (desa)	19,51	-363	37,45	52,68
cluster 2 (peri-urban)	32,38	29392	25,53	60,08
cluster 3 (kota)	83,85	37679	5,97	43,02

Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009

Tabel IV.5 menunjukkan peringkat kelompok-kelompok di kawasan metropolitan dilihat dari kondisi demografisnya. Berdasarkan tabel tersebut, kelompok peri-urban di Jabodetabekjur memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berada di antara kelompok desa dan kelompok kota inti. Selain itu, dilihat dari angka migrasi nettonya, kawasan peri-urban menunjukkan angka yang positif dan berada pada posisi tertinggi setelah kota inti. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kawasan peri-urban merupakan sasaran tujuan migrasi terbesar kedua setelah kelompok kota inti. Tingkat migrasi netto kawasan peri-urban dan kota inti yang sangat tinggi membuktikan bahwa kedua kawasan tersebut merupakan sasaran utama migrasi masyarakat, terutama masyarakat dari perdesaan yang ingin memperbaiki kesejahteraan mereka. Asumsi tersebut dibenarkan oleh tingkat migrasi netto kawasan perdesaan yang menunjukkan nilai minus, artinya lebih banyak masyarakat yang melakukan migrasi keluar daripada migrasi masuk. Dilihat dari rasio jumlah keluarga prasejahtera terhadap total keluarga, kecamatan-kecamatan yang berada di dalam kelompok desa memang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera yang paling tinggi dibandingkan klaster lainnya.

² Tanpa data kota tangerang selatan

Sedangkan, kelompok kota dan peri-urban memiliki tingkat rasio keluarga pra sejahtera yang nilainya jauh dibawah kelompok desa. Artinya, kelompok desa memiliki lebih banyak jumlah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan di kota. Perbedaan tingkat kesejahteraan ini mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan yang tinggi antara kelompok kota dan desa. Hal inilah yang melatarbelakangi sebagian besar masyarakat desa untuk melakukan migrasi keluar, yaitu dengan tujuan ingin memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka. Kelompok peri-urban merupakan tujuan yang tepat bagi migrasi masyarakat desa karena tingginya nilai lahan di kota inti menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi bertempat di kawasan peri-urban. Selain itu, tingginya kawasan permukiman baru di kawasan peri-urban seakan-akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan migrasi ke kawasan pinggiran

Peningkatan kepadatan penduduk di kawasan peri-urban secara lebih khusus dijelaskan oleh tabel dibawah ini:

**TABEL 1V.6
PENINGKATAN KEPADATAN PENDUDUK KAWASAN PERI-URBAN**

NAMA KECAMATAN	1999			2008		
	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
Nanggung	71,24	58318	818,61	135,25	88139	652,00
Leuwisadeng	*	*	*	32,83	73048	2225,00
Pamijahan	80,88	109416	1352,82	80,88	136006	1682,00
Cibungbulang	31,98	90062	2816,20	32,66	123007	3766,00
Ciampea	55,59	143384	2579,31	51,06	139478	2731,00
Tenjolaya	*	*	*	23,68	50883	2149,00
Dramaga	24,06	70002	2909,48	24,38	90476	3712,00
Ciomas	85,36	156013	1827,71	16,31	129565	7946,00
Tamansari	*	*	*	21,61	81860	3787,00
Cijeruk	72,08	120611	1673,29	31,66	75137	2373,00
Cigombong	*	*	*	40,43	83143	2057,00
Caringin	60,31	85869	1423,79	57,30	109583	1913,00
Ciawi	25,18	70897	2815,61	25,81	92642	3589,00
Cisarua	60,31	81595	1352,93	63,74	109882	1724,00
Megamendung	40,06	73726	1840,39	39,87	91036	2283,00
Sukaraja	42,02	111065	2643,15	42,97	152078	3539,00
Babakan Madang	98,71	67606	684,90	98,71	86257	874,00
Sukamakmur	133,36	56854	426,32	126,78	73978	584,00
Jonggol	85,66	75246	878,43	126,86	113276	893,00

NAMA KECAMATAN	1999			2008		
	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
Klapanunggal	*	*	*	97,64	76266	781,00
Gunung Putri	56,31	104320	1852,60	56,29	225780	4011,00
Citeureup	67,10	106921	1593,46	67,19	170123	2532,00
Bojonggede	55,61	161055	2896,15	29,55	205568	6956,00
Rancabungur	*	*	*	21,69	97083	4477,00
Parung	60,75	117826	1939,52	73,77	101736	1379,00
Ciseeng	*	*	*	36,79	94505	2569,00
Gunung Sindur	48,81	58528	1199,10	51,26	86054	1679,00
Rumpin	80,66	82558	1023,53	111,01	124626	1123,00
Cigudeg	232,07	127092	547,65	158,90	113310	713,00
Sukajaya	*	*	*	76,28	62924	825,00
Jasinga	134,27	85000	633,05	208,07	95223	458,00
Parung Panjang	62,95	68594	1089,66	62,59	93558	1495,00
Bogor Utara	17,72	109556	6182,62	17,72	166245	9382,00
Tanah Sareal	18,84	122908	6523,78	18,84	185061	9823,00
Cimanggis	50,58	242626	4796,88	53,54	412388	7702,43
Limo	31,14	77492	2488,50	22,80	152938	6707,81
Cisoka	72,00	139816	1935	26,98	70866	2626,00
Solear	*	*	*	29,01	67668	2333,00
Tigaraksa	78,00	117013	1502	48,74	99545	2042,00
Jambe	*	*	*	26,02	39423	1515,00
Cikupa	80,00	190584	2383	42,68	192974	4521,00
Panongan	*	*	*	34,93	69069	1977,00
Legok	93,00	174300	1866	35,13	84662	2410,00
Pagedangan	*	*	*	45,69	81115	1776,00
Cisauk	*	*	*	27,77	45503	1639,00
Pasar Kemis	91,00	146995	1608	25,92	192264	7418,00
Sindang Jaya	*	*	*	37,15	70486	1897,00
Jayanti	*	*	*	23,89	58581	2452,00
Sukamulya	*	*	*	26,94	60810	2257,00
Gunung Kaler	*	*	*	29,63	53541	1807,00
Mauk	138,00	188218	1368	51,42	79543	1547,00
Kemiri	*	*	*	32,70	43101	1318,00
Sukadiri	*	*	*	24,14	55826	2313,00
Rajeg	56,00	94987	1683	53,70	111401	2074,00
Sepatan Timur	61,00	144389	2379	18,27	73733	4036,00
Pakuhaji	82,00	104721	1283	51,87	103493	1995,00
Teluknaga	40,00	125068	3013	40,58	128737	3172,00
Kosambi	31,00	91577	2972	29,76	109403	3676,00
Pamulang	28,00	198280	7112	27,66	254085	9186,00
Larangan	*	*	*	9,40	137621	14641,00
Jatiuwung	33,56	334416	9964,72	14,41	117688	8167,00
Batuceper	27,66	150049	5424,78	11,58	79535	6868,00
Benda	5,92	57951	9783,9	5,92	66507	11234,00
Setu	72,73	88498	1217	62,16	83016	1336,00

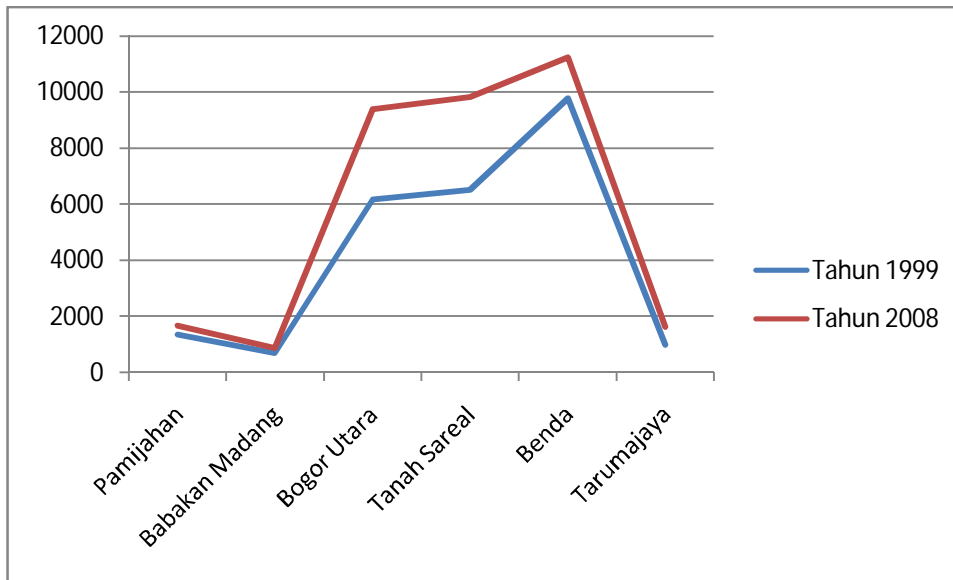
NAMA KECAMATAN	1999			2008		
	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	LUAS	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
Serang Baru	*	*	*	63,80	67433	1057,00
Cikarang Pusat	*	*	*	47,60	44644	938,00
Cibarusah	112,40	79070	703	50,39	65189	1294,00
Cikarang Timur	*	*	*	51,31	79823	1556,00
Cikarang Utara	*	*	*	43,30	173601	4009,00
Cibitung	95,03	215091	2263	45,30	155679	3437,00
Cikarang Barat	*	*	*	53,69	168261	3134,00
Tambun Selatan	*	*	*	43,10	369233	8567,00
Tambun Utara	*	*	*	34,42	96326	2799,00
Babelan	63,61	101403	1594	63,60	159247	2504,00
Tarumajaya	54,63	53620	982	54,63	89124	1631,00
Sukatani	88,36	110540	1251	37,52	68743	1832,00
Bantar Gebang	44,83	90132	2010,52	17,05	75460	4426,00
Cugeunang	70,00	81239	1160,56	65,37	97818	1496,37
Pacet	92,82	159276	1715,97	54,11	102750	1898,90
Cipanas	*	*	*	58,03	95274	1461,80
Sukaesmi	116,38	65484	562,67	113,31	81267	717,20
TOTAL	3611,54	6137857	1699,512	4027,3	8982930	2230,509

Ket:* data tidak tersedia karena kecamatan belum terbentuk (belum terjadi pemekaran wilayah)

Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 1999 dan 2008

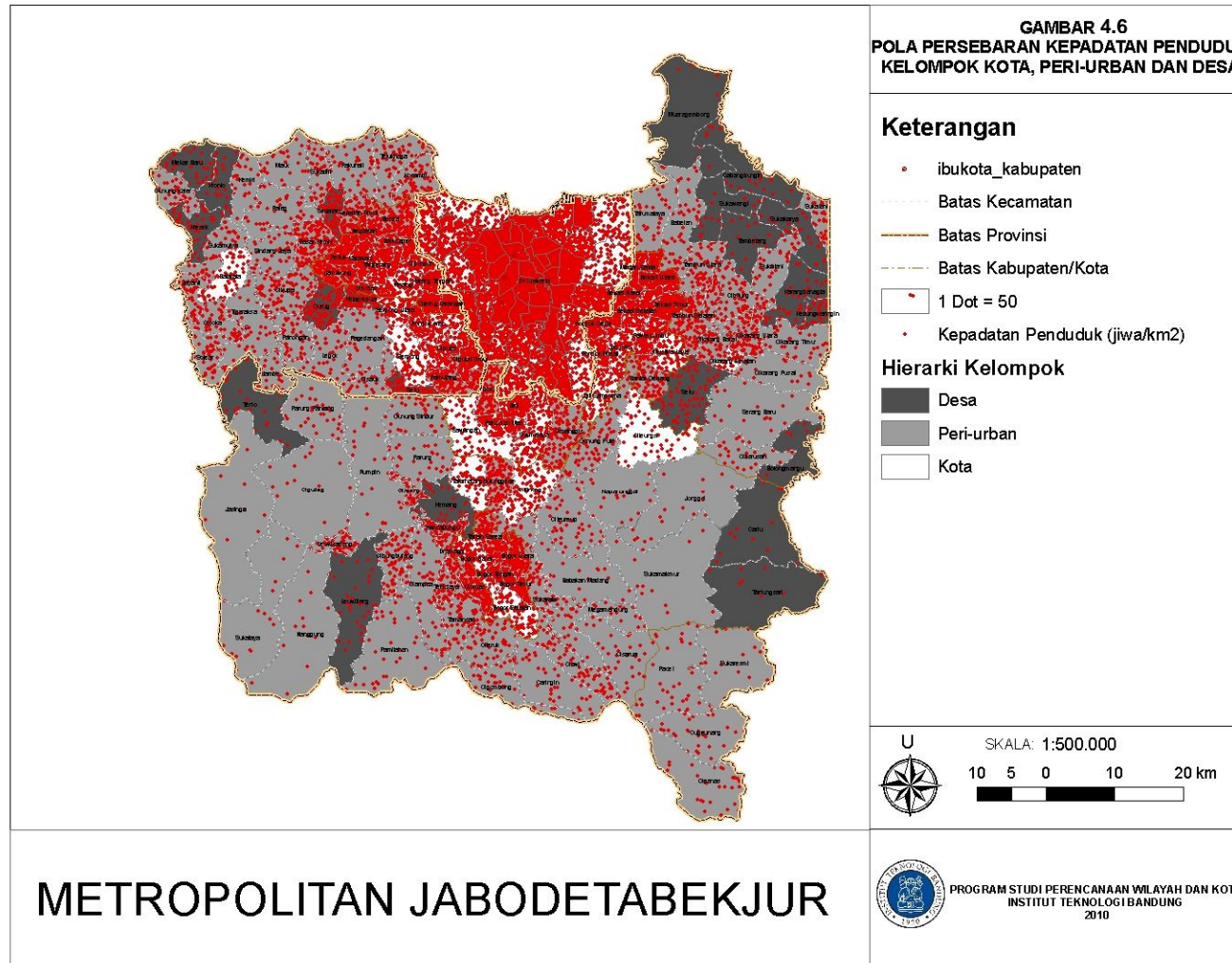
Berdasarkan tabel IV.6, dapat dilihat bahwa seluruh kecamatan di kawasan peri-urban mengalami kenaikan tingkat kepadatan penduduk. Namun, untuk sebagian besar kecamatan, kenaikan tingkat kepadatan penduduk ini juga diikuti oleh perubahan luas wilayah kecamatan. Oleh sebab itu, agar dampak peningkatan kepadatan penduduk terhadap peri-urbanisasi dapat direpresentasikan dengan lebih baik maka kecamatan-kecamatan yang dilihat adalah kecamatan-kecamatan yang tidak mengalami perubahan luas. Peningkatan kepadatan penduduk bagi kecamatan-kecamatan yang luas kecamatannya tetap adalah sebagai berikut:

GAMBAR 4.5
PENINGKATAN KEPADATAN PENDUDUK
KECAMATAN PERI-URBAN YANG MEMILIKI LUAS TETAP

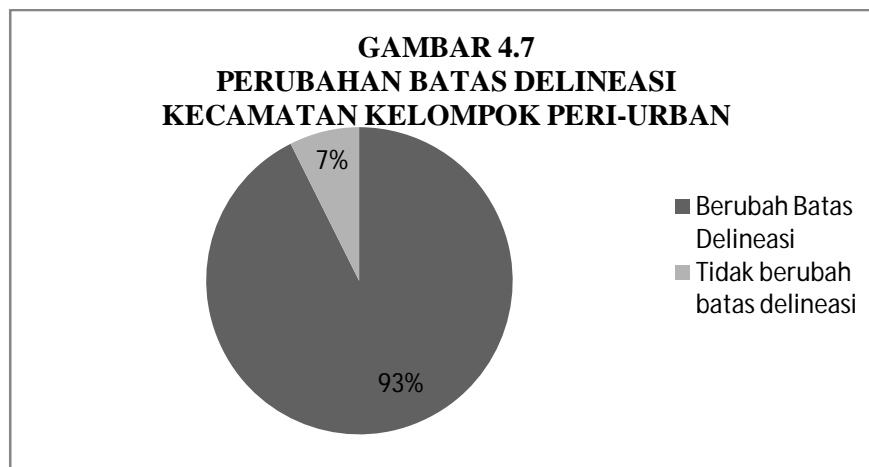


Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 1999 dan 2008

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan di kelompok peri-urban yang tidak mengalami perubahan luas dan batas-batas spasial hanya terdiri dari enam kecamatan. Enam kecamatan dalam kelompok peri-urban tersebut sama-sama mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 1999 hingga tahun 2008. Dari ke enam kecamatan di atas, kecamatan yang menunjukkan selisih kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan Bogor utara dan kecamatan Benda. Sedangkan, kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang kecil adalah Kecamatan Babakan Madang. Ketimpangan kepadatan penduduk ini salah satunya dipengaruhi oleh kedekatan kecamatan tersebut dengan kelompok lain. Kecamatan Benda berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat. Kecamatan Bogor Utara pun berbatasan langsung dengan pusat dari kota Bogor yaitu Bogor Tengah dan Bogor Timur. Sedangkan untuk kecamatan Pamijahan yang memiliki kepadatan penduduk kecil berlokasi di bagian selatan Metropolitan Jabodetabekjur, jauh dari kota inti. Pengaruh kedekatan spasial kota inti dengan kepadatan penduduk kawasan peri-urban ditunjukkan oleh Gambar 4.6.



Selain menyoroti masalah kepadatan penduduk, tabel IV.6 juga memperlihatkan perubahan batas delineasi yang dialami oleh kecamatan-kecamatan di kawasan peri-urban. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kecamatan seiring dengan fenomena peri-urbanisasi. Peningkatan jumlah kecamatan atau yang dikenal dengan sebutan pemekaran wilayah ini mengakibatkan perubahan batas delineasi dan luas kecamatan di kawasan peri-urban. Dari gambar 4.7, dapat dilihat bahwa sebagian besar kecamatan mengalami perubahan batas delineasi. Hanya 7% kecamatan di kawasan peri-urban yang tidak mengalami perubahan luas dan batas delineasi. Selain itu, mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2008, terdapat 28 kecamatan baru di kawasan peri-urban yang merupakan hasil dari pemekaran wilayah. Dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa peri-urbanisasi mengakibatkan fungsi kecamatan menjadi semakin dinamis. Fenomena peri-urbanisasi mengakibatkan semakin kompleksnya tantangan dan permasalahan yang dialami oleh kecamatan-kecamatan di dalam kelompok peri-urban. Hal ini mengakibatkan wilayah-wilayah tersebut membutuhkan fokus dan spesialisasi penanganan. Dengan adanya pemekaran wilayah, kabupaten atau kecamatan pada tingkat dibawahnya memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan prioritas kebutuhan dan masalah yang harus diselesaikan. Ditambah lagi, otonomi daerah membuat kabupaten dapat mengelola sumberdaya dengan lebih bebas. Hal inilah yang memancing beberapa kecamatan untuk melakukan pemekaran wilayah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kecamatan-kecamatan yang secara fungsional tidak membutuhkan penanganan yang kompleks namun tetap menjadi objek pemekaran wilayah. Terkadang hal ini disalahartikan dan peri-urbanisasi hanya dijadikan alat untuk pemekaran wilayah.



Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009

4.3.3 Indikator Ekonomi

Peningkatan kegiatan ekonomi nonpertanian ditunjukkan oleh peningkatan jumlah industri dan permukiman. Pada awalnya, kegiatan industri di Jabodetabekjur hanya mendominasi kawasan Kota Inti. Namun, industri tersebut kemudian mulai berpindah secara berangsur-angsur ke kawasan Peri-urban. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut:

TABEL IV.7
PERTUMBUHAN JUMLAH INDUSTRI SEDANG DAN BESAR
TAHUN 1999-2008

Kota/ Kabupaten	1999	2008
Kota Administrasi Jakarta Pusat	88	143
Kota Administrasi Jakarta Barat	774	816
Kota Administrasi Jakarta Utara	963	989
Kota Administrasi Jakarta Timur	449	431
Kota Administrasi Jakarta Selatan	198	187
Kepulauan Seribu	0	0
Kabupaten Tangerang	*	950
Kabupaten Bekasi	*	1236
Kabupaten Bogor	666	908
Kota Depok	109	129
Kota Bogor	*	14
Kota Tangerang	699	687
Kota Bekasi	230	234

Keterangan: *data tidak tersedia

Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009

Dari tabel IV.7, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008, terjadi peningkatan jumlah industri sedang dan besar di kawasan kota inti yaitu di kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Namun, untuk kota administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan jumlah industri sedang dan besar justru mengalami penurunan. Penurunan jumlah industri di Jakarta timur dan Jakarta Selatan diiringi oleh peningkatan jumlah industri di Kawasan peri-urban. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.4, Bila dilihat dari aspek spasialnya, Kota administrasi Jakarta Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi. Sedangkan, Kota administrasi Jakarta Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang memiliki banyak kawasan industri yang menjadi lokasi aglomerasi bagi berbagai jenis industri, diantaranya kawasan industri Lippo Cikarang dan Jababeka di Kabupaten Bekasi dan Kawasan Cikupa di Kabupaten Tangerang. Artinya, terjadi perpindahan tujuan lokasi industri dari kota inti ke Kabupaten tangerang dan Kabupaten Bekasi yang sebagian besar kecamatannya termasuk ke dalam kawasan peri-urban. Berdasarkan informasi tersebut, Kawasan peri-urban memberikan alternatif lokasi yang baik bagi industri karena nilai lahannya cenderung lebih murah daripada di kota inti. Selain itu, aglomerasi industri membuat para pelaku industri dapat menghemat biaya produksinya.

Tingkat urbanisasi kawasan peri-urban juga ditunjukkan oleh Tabel IV.8. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa berdasarkan kegiatan industrinya, kawasan peri-urban dan kota inti menunjukkan pola interaksi kota-desa (*rural-urban continuum*). Artinya, tingginya rasio industri pada klaster peri-urban yang memiliki kedekatan spasial dengan kelompok kota inti menunjukkan bentuk perluasan dari kegiatan industri di kota inti yang disebabkan oleh semakin padatnya kegiatan industri di kota inti. Selain itu, nilai lahan yang tinggi di kota inti meningkatkan intensitas pemilihan lokasi di kawasan peri-urban terutama bagi industri yang membutuhkan luas lahan yang besar. Tingkat urbanisasi kelompok peri-urban juga ditunjukkan oleh intensitas lahan pertanian yang berada di antara kelompok desa dan kota inti, yaitu sebesar 176,71 m²/jiwa. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Peri-urbanisasi adalah proses dinamis yang

terjadi ketika kawasan desa yang berada di sekitar kawasan perkotaan mengalami perubahan karakteristik menjadi lebih bersifat perkotaan, baik dari segi fisik, ekonomi maupun sosial. Artinya, kawasan peri-urban yang ada di Jabodetabekjur memiliki kombinasi kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Kawasan Peri-urban ini merupakan pusat aktivitas pertanian bagi masyarakat lokal dan sekaligus sebagai sasaran investasi kegiatan industri sedang dan besar.

TABEL IV.8
STRUKTUR EKONOMI TIGA KELOMPOK
METROPOLITAN JABODETABEKJUR

NAMA KELOMPOK	LUAS SAWAH PER KAPITA (m ² /jiwa)	RASIO INDUSTRI SEDANG DAN BESAR PER LUAS KECAMATAN
Kelompok 1 (desa)	481,68	0,71
Kelompok 2 (peri-urban)	176,71	0,90
Kelompok 3 (kota)	13,06	1,89

Sumber: Hasil analisis, 2010 dari data-data pada kabupaten/kota dalam Angka, BPS, 2009

Evers dan Korff (2002) menyatakan bahwa meskipun ekonomi banyak ditentukan oleh mekanisme pasar dan undang-undang negara terutama di negara industri modern, namun ada lingkup kehidupan sehari-hari yang cukup besar berlangsung di luar pasar dan negara. Keberlangsungan hidup masyarakat pada mulanya mengandalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri dan lingkungan sosial terdekatnya. Dengan tersedianya lahan pertanian di kawasan pinggiran artinya masyarakat bisa tetap melakukan *produksi subsisten*³. Hal ini penting bagi perkembangan metropolitan sebab pola produksi ini telah mulai langka dalam kehidupan masyarakat metropolitan Jabodetabekjur. Pada tahun 1981, Evers dan Korff menyatakan bahwa pola mengkonsumsi sendiri hasil pertanian merupakan sesuatu yang umum di pedesaan seluruh Indonesia dan pola-pola ini meluas sampai ke daerah-daerah pertanian yang ada di kota. Hal ini terlihat dari tingkat angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian di DKI Jakarta

³ Produk yang tidak berorientasi pasar. Hasil produksi menjadi konsumsi pribadi. Contoh: produksi pertanian kecil

sebesar 37% pada tahun 1981 dan menurun drastis menjadi 0,68% pada tahun 2007.

Dilihat dari data rasio sawah dan rasio industri sedang besar, kelompok peri-urban memiliki keseimbangan kegiatan ekonomi antara pertanian dan industri. Masuknya kegiatan industri ke kawasan pinggiran mengubah kesempatan kerja masyarakat lokal. Sebagian masyarakat yang tadinya bekerja pada bidang pertanian berangsur-angsur mulai pindah ke sektor industri. Bahkan, keberadaan sektor industri ini mengakibatkan tingginya migrasi masuk di kawasan peri-urban.